

Mendagri Tunjuk Empat Pejabat Pemprov Kalsel Jadi Pjs Bupati dan Wali Kota, Ini Daftarnya



Ilustrasi - Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hibah revitalisasi BumDes 2024 oleh Kadis PMD Kalsel, Faried Fakhmansyah, Kamis (2/5/2024). Faried ditunjuk menjadi Pjs Bupati HST menggantikan Bupati HST Aulia Oktafiandi yang mengajukan cuti di luar tanggungan negara.

Sumber gambar :

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Penandatanganan-NPHD-hibah-Bumdes-2024.jpg>

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) resmi menunjuk Faried Fakhmansyah sebagai pejabat sementara (Pjs) Bupati Hulu Sungai Tengah (HST).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan bertugas menggantikan Aulia Oktafiandi yang maju pada Pilkada HST 2024.

Faried akan memegang roda pemerintahan di HST sampai masa kampanye Pilkada berakhir pada 23 November mendatang.

“Terima kasih atas amanah yang diberikan oleh Mendagri dan Gubernur Paman Birin sebagai Pjs Bupati HST. Mohon doa semoga bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” kata Faried melalui pesan Whatsapp, Senin (23/9/2024).

Faried menyebut, yang paling penting melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, fasilitasi pilkada dan menjaga netralitas ASN.

“Kemudian kita harus memastikan pelayanan publik di Kabupaten HST tidak terkendala,” tambahnya.

Pelantikan Pjs empat bupati dan wali kota ini diagendakan pada Selasa (24/9/2024) di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru.

Selain Fariied, ada tiga pejabat Pemprov Kalsel lain yang ditunjuk sebagai Pjs kepala daerah. Mereka adalah Taufik Hidayat, Akhmad Fydayeen, dan Hj Nurliani.

Taufik Hidayat merupakan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel.

Taufik memegang roda pemerintahan sementara di Balangan menggantikan Abdul Hadi.

Kemudian, Akhmad Fydayeen yang merupakan Inspektur Daerah Provinsi Kalsel ditunjuk sebagai Pjs Bupati Banjar. Menggantikan Saidi Mansyur.

Sementara Hj Nurliani, ditunjuk sebagai Pjs Wali Kota Banjarbaru. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel menggantikan Aditya Mufti Arifin untuk memegang roda pemerintahan di Kota Idaman.

Empat kepala daerah dan wakilnya di Kalimantan Selatan wajib Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) saat masa kampanye Pilkada Serentak 2024.

Pasalnya, keempat pasangan itu kembali maju pada pemilihan 27 November mendatang. Mereka adalah Aditya Mufti Ariffin-Wartono (Banjarbaru), Saidi Mansyur-Said Idrus (Banjar), Abdul Hadi (Balangan), dan Aulia Oktafiandi-Mansyah Sabri (Hulu Sungai Tengah).

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan (Kalsel) Aulia Oktafiandi memberikan dana hibah senilai Rp70 juta ke Masjid Al Mujahid di Desa Lok Besar, Kecamatan Batang Alai Selatan.

“Bantuan dana hibah diserahkan kepada pengurus untuk kebutuhan masjid. Kehadiran kami sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat,” kata dia di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Sabtu.

Bupati HST pada setiap kunjungannya ke tiap desa, tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga menjalin silaturahmi bahkan menyempatkan shalat berjamaah dengan masyarakat, utamanya saat momen shalat Jumat.

“Dana hibah untuk Masjid Al Mujahid tidak bisa memenuhi keseluruhan sesuai proposal, tapi mudah-mudahan dana hibah yang kami berikan ini bisa bermanfaat dalam rangka pembangunan Masjid Al Mujahid,” ucapnya.

Dia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen untuk memperhatikan kebutuhan dan tempat ibadah yang layak bagi masyarakat, baik itu langgar maupun masjid yang ada di Kabupaten HST.

Bupati HST menjelaskan penyaluran bantuan ke lapangan menjadi kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah bisa berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat di tengah banyaknya tanggung jawab dan kesibukan yang dijalankan untuk pembangunan daerah.

Dia berharap dengan turun langsung ke desa, ini menjadi momentum masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan aspirasi untuk kemajuan pembangunan di daerah. Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk terus memberikan dukungan kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan meluangkan waktu berkunjung ke desa, mudah-mudahan banyak manfaat yang kita peroleh untuk memajukan daerah,” ujar Aulia.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/09/23/mendagri-tunjuk-empat-pejabat-pemprov-kalsel-jadi-pjs-bupati-dan-wali-kota-ini-daftarnya>
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/427903/bupati-hst-beri-dana-hibah-rp70-juta-ke-masjid-al-mujahid-lok-besar>

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah dalam pengelolaan keuangan daerah tertuang dalam

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
 - a. Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 - b. Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:
 - 1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - a) Pasal 3
Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa
 - b) Pasal 4
Ayat (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - (1) Huruf a. Pemerintah;

- (2) Huruf b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
- (3) Huruf c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

c) Pasal 19

- (1) Ayat (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ayat (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ayat (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.
- (4) Ayat (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

d) Pasal 28

- (1) Ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
- (2) Ayat (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

e) Pasal 29

Ayat (1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja Operasi mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

- a. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
 - 1) *Huruf a)* pemerintah pusat
 - a) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - b) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - d) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - e) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
 - 2) *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya.
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) *Huruf c)* BUMN.
Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 4) *Huruf d*) BUMD;
Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- 5) *Huruf e*) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- a) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- (1) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - (2) *Huruf (b)* memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - (3) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- c) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- (1) *Huruf (a)* telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - (2) *Huruf (b)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - (3) *Huruf (c)* memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - (4) *Huruf (f)* Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) *Angka 6)* Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- (1) *Huruf a)* peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (2) *Huruf b)* bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (3) *Huruf c)* tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) *Angka (1)* kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang

tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(b) *Angka (2)* badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(c) *Angka (3)* partai politik dan/atau

(d) *Angka (4)* ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

(1))*Huruf d*) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

(2))*Huruf e*) memenuhi persyaratan penerima hibah.

e) *Angka 7) Pemberian* hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.

f) *Angka 8) Penerima* hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

g) *Angka 9)* Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah

Huruf E. Pengguna Anggaran *Angka 2*. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c*. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Huruf C. Pendapatan Daerah *Angka 4*. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a. *Huruf a*. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;

b. *Huruf c*. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. *Huruf d*. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

d. *Huruf e*. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

